

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PESISIR DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR

Lena Farida¹ dan Sujianto²

Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Riau¹
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik²

ABSTRACT

Coastal Development is very strategic because it contains the potential of biological and non biological resources. Based on the ecological approach, coastal areas cover all areas that are the meeting area between land and sea. In Law no. 1 Year 2014 stated that: Coastal Area is a transition area between terrestrial and marine ecosystems that are affected by land and sea changes, towards land covering the administrative area of the subdistrict and towards the sea as far as 12 nautical miles measured from the coastline.

Development carried out in coastal areas implemented by all communities, both men and women. Women in the coastal areas are socio-economic potentials, which contribute greatly to fisheries, marine affairs, environmental conservation and the enhancement of family welfare. However, there are still many problems surrounding her life. The low access and participation of coastal women in environmental issues and environmental management around them, so they can not participate in the spatialization of their environment and natural resources, so that in the utilization of coastal resources resources are still limited, do not participate in the supervision and the weakness of the benefits received women as subjects of development. However, based on several studies on women's empowerment in coastal areas, the economic contribution of women is quite high. Likewise, in the coastal areas of Kecamatan Pasir Limau Kapas, Rokan Hilir regency, many women participated in utilizing coastal resources. The purpose of this study is to produce an overview and analyze the Empowerment of Women from an ecological, economic and socio-cultural perspective based on indicators of access, participation, control and benefits. While Methods Data collection is to spread the questionnaire to 99 (ninety nine) female respondents and conduct interviews with informants who selected intentionally, which is relevant to the research. The indicators of women's empowerment include access, participation, control and benefits in terms of ecological, economic and socio-cultural aspects.

Research results based on respondents' answers and interviews, obtained a picture of women that Age of respondents scattered in all age groups productive. Most respondents aged 36-40 years old by 29.29%. Marital status of the respondents was 73.73% with marital status. The number of children of the respondents is not too much, because almost all participate in family planning program. Who have children with the number of 0 - 3 people amounted to 75.76%. The number of family dependents is not too large. Only 02% of respondents who bear the number of families between 7-9 people. And 87.88% bear between 0-3 people. Religious Respondents 69.70% are Muslim, Respondents 11.11% are Christian and Respondents 19.19% are Buddhist / Confucian. The results of interviews with them, obtained information that religious life in their location live quite harmoniously. Last Education: 39.39% of respondents are educated to graduate high school and equivalent, while only 4.04% are already Bachelor (S1), 37.37% have junior high school education and 19.20% complete primary school. Respondents' education level does not prevent them from carrying out various activities in their area. Respondent's work: The description of female respondents is spread in various types of work. The highest number is women who work as traders / entrepreneurs as much as



dalam hukum dan pemerintahan. Ini menjadi acuan pokok bagi semua kegiatan-kegiatan perempuan, untuk memperbaiki nasibnya, untuk mengikuti aktifitas dalam meningkatkan kehidupannya, serta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, dengan UU No. 7 Tahun 1984, diratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi wanita (Convention on the Elimination of all forms of discrimination Against Woman). Dalam konvensi tersebut ditegaskan pentingnya persamaan hak bagi pria dan wanita, dengan menghilangkan diskriminasi terhadap wanita disemua bidang kehidupan dalam masyarakat maupun keluarga dan tercapainya kesejahteraan dalam Negara dan perdamaian dunia (T.O. Chrochosi; 2005).

Pada saat ini, pengakuan terhadap pentingnya peranan perempuan dalam proses pembangunan semakin meningkat dan secara khusus mengakui kontribusinya dalam pembangunan sosial ekonomi Nasional. Sejalan dengan itu telah meningkat juga kesadaran dan pengakuan terhadap kelemahan perencanaan pembangunan dalam memperhatikan secara penuh dan memperhitungkan secara tepat dan sistematis sumbangan perempuan tersebut terhadap proses pembangunan maupun dampak pembangunan terhadap aspirasi dan kepentingan perempuan terutama di sektor ekonomi. Salah satu visi pembangunan nasional adalah terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberi fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan.2006).

Pemberdayaan Perempuan merupakan suatu usaha pemampuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya, serta mendapatkan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. (*Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia*).

Perempuan pesisir adalah kelompok wanita pada usia produktif yang menjadi bagian dari masyarakat pesisir, yang berdomisili di pesisir pantai kepulauan Indonesia atau pulau-pulau terluar, dengan ciri desa-desa pantai yang relatif tradisional, serta memiliki kehidupan sosial ekonomi yang sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Kehidupan perekonomian yang diusahakan perempuan pesisir tidak terlepas dari tradisi komunitas melingkupinya. Banyak hal yang dilakukan oleh kaum perempuan di wilayah pesisir, diantaranya sebagai istri nelayan melaksanakan fungsi sebagai istri dan ibu bagi anak-anak, membantu dalam pembudidaya ikan, bekerja sebagai pengolah dan pedagang laut, berdagang atau membuka warung, mengusahakan pertanian dan pengolahan pertanian dengan jenis tanaman pantai dan ikut bertanggung jawab dengan adanya dampak kerusakan sumber daya pesisir. Berdasarkan beberapa penelitian tentang pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir menunjukkan bahwa kontribusi secara ekonomi dari kaum perempuan cukup tinggi.

Provinsi Riau, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya sebagian besar terdiri dari Pulau-Pulau, dibatasi Lautan, dan memiliki wilayah Pesisir yang sangat luas, yang terdiri dari 12 (duabelas) kabupaten / Kota. Salahsatu Kabupaten, yang merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, berdasarkan UU No.53 tahun 1999. Selanjutnya dengan UU No.34 tahun 2008 ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir. Terdiri dari 18 kecamatan, 15 kelurahan dan 178 kepenghuluan dengan jumlah penduduk 618.355 jiwa, yang terdiri dari laki laki 3318.779 (51,55%) dan perempuan 299.576 (48,45%). Dari 18 kecamatan tersebut, diantaranya 5 kecamatan berada di pulau, yakni kecamatan Kubu berada di pulau Halang, kecamatan Pasir Limau Kapas di pulau Jemur, kecamatan Bangko di pulau



Merkey, Kecamatan Pedamaran di pulau Pedamaran dan kecamatan Sinaboi di pulau Sinaboi. Dari lima kecamatan tersebut, tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) berdasarkan ibukota kecamatan, maka Panipahan sebagai ibukota Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan wilayah yang terendah, yakni hanya 1,5 m diatas permukaan laut. Sungai yang melintas di kecamatan ini adalah Sungai Daun. Kecamatan Pasir Limau Kapas terdiri dari 7 Kependhuluan/Desa, 89 RW dan 243 RT. Luas wilayah 669,63 km², dengan jumlah penduduk 36.454 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 18.824 jiwa (51,64%) dan perempuan 17.630 jiwa (48,36%). Kepadatan penduduk 54 jiwa per km² dengan jumlah rumah tangga 7.869 dan rata-rata jiwa per rumah tangga 4,63%. Kependhuluan/Desa di kecamatan ini : Kep.Panipahan, Kep.Teluk Pulau, Kep.Pasir Limau Kapas, Kep.Sungai Daun, Kep.Panipahan Darat, Kep.Panipahan Laut dan Kep.Pulau Jemur. (Rokan Hilir dalam angka tahun 2015).

Survey awal yang telah dilakukan oleh peneliti, masih ditemukan berbagai permasalahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, antara lain dari perpektif ekologi terlihat masih memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekosistem sehingga tidak dapat menjaga kelestarian alam sekitarnya, masih terbatasnya akses masyarakat perempuan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sementara dari perpektif ekonomi, terlihat masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir, perempuan memiliki potensi namun tidak teraktualisasi secara maksimal, lemahnya partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengambilan keputusan, karena pada umumnya masyarakat miskin ini sulit dilibatkan dalam berbagai keputusan serta pola hubungan kerja ditinjau dari perspektif gender dalam pengelolaan wilayah pesisir yang masih bias gender (masih belum melibatkan perempuan), yang mengakibatkan kaum perempuan tidak berperan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ *Pemberdayaan Perempuan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir* :

Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
 (a). Bagaimana gambaran perempuan di wilayah pesisir Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir ? (b). Bagaimana Pemberdayaan Perempuan dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial budaya berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir ?

Sasaran dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tentang pemberdayaan perempuan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir. Sasaran penelitian adalah : (a). Untuk mendapatkan gambaran tentang perempuan di wilayah pesisir di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir. (b). Menganalisis Pemberdayaan Perempuan dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial budaya berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Manfaat / Manfaat Penelitian.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Masyarakat Pemerintah Daerah, dengan menghasilkan sebuah Model Pemberdayaan Perempuan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir serta dapat menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi pengembangan teori, yakni menemukan sebuah model yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir.



TINJAUAN PUSTAKA.

Pemberdayaan.

Pemberdayaan atau “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut merriam webster dan exfort english dictionary (Prijono dalam Ambarsari, 2007) mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan.

Paulus Wirutomo dkk (dalam Zaili Rusli, 2014) menyampaikan pemberdayaan kata lainnya adalah pemerksasaan, yang menyebutkan bahwa: “pemerksasaan dimaknai sebagai mendapat akses kesumber-sumber daya yang menjadi asas dari kekuasaan suatu sistem maupun organisasi. Konsep pemerksasaan ini ada tiga tahap, yakni (1) pada tingkat politik dan nasional, pemerksasaan itu mekanismenya bantuan diri untuk orang lain, (2) pada tingkat organisasi, dan (3) pada tingkat individu.”

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara metodologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge, attitude, maupun practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik. Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang sadar, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif berasal dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-pembangunan lain.

Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Ditingkat ideologis, konsep pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top down dan bottom-up antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antara otonomi. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Pembangunan yang bersifat top-downistik dapat menghambat tumbuhnya kesadaran masyarakat karena masalahnya ada di masyarakat itu sendiri, yang kadangkala mereka tidak mampu memanfaatkan potensi dan pember daya yang ada. Selain itu kondisi struktural yang ada tidak memberikan kesempatan kepada msyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi serta merealisasikan potensinya, sehingga masyarakat dalam kondisi tidak berdaya.



Dari berbagai pengertian tentang pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan dari pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi tawar menawar yang dimiliki, baik dalam hal yang memberi daya dan yang memperoleh daya tersebut. Maka yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, salah satu program pembangunan adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan diri sendiri (*self empowerment*), pemberdayaan dari pemerintah (*government empowerment*) dan dari non pemerintah (*community empowerment*).

Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan.

Menurut *Caroline Moser (2006:200)*, pendekatan kebijakan terhadap perempuan dan pembangunan (*Women dan Development*) yang berkembang dari kepedulian terhadap persamaan ini, pendekatan persamaan adalah pendekatan yang mengakui bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduktifnya memberikan kontribusi kritis, meski tidak diakui, terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut dimulai dengan asumsi dasar bahwa strategi ekonomi seringkali berdampak negatif kepada perempuan, dan mengakui bahwa mereka harus “dibawa kedalam” proses pembangunan melalui akses terhadap pekerjaan dan pasar. Moser juga menyampaikan konsep tentang perbedaan antara kebutuhan gender yang “praktis” dan “strategis” sebagai kriteria evaluasi untuk beberapa pendekatan pembangunan yang berbeda. Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan yang segera meredakan beban kehidupan perempuan, tetapi tidak menyinggung ketimpangan (*inequality*) pembagian kerja secara seksual. Sedangkan kebutuhan strategis gender merupakan kebutuhan jangka panjang yang menghilangkan ketidak seimbangan gender didalam dan diluar rumah tangga serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka.

Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya memegang peranan dalam pemenuhan kesejahteraan bersama secara fisik, material maupun spiritual, juga dalam meningkatkan posisi social perempuan dalam keluarga, yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dicapai, sumbangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ketidak tergantungan secara ekonomi kepada suami. Berkaitan dengan pekerjaan kaum perempuan, masih adanya anggapan kalau lelaki adalah “pencari nafkah” keluarga, maka perempuan yang bekerja selalu dianggap sambilan atau membantu suami. Namun demikian peran perempuan semakin nyata dalam kerja produktif, serta alokasi ekonomi memberikan kepada keluarga.

Pemberdayaan perempuan yang disampaikan Novian (2010) adalah upaya pemberdayaan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya.

Dalam Pemberdayaan Perempuan, menurut Nursahbani Katjasungkana (Riant dan Yudianto, 2008), mengemukakan ada empat indikator dalam pemberdayaan perempuan, yaitu: (1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber-sumber daya produktif dalam lingkungan. (2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumberdaya tersebut. (3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol terhadap sumber daya. dan (4). Manfaat,



ahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara. Selanjutnya, Prof. Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008), dalam melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yakni : (1). Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan. (2). Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. (3). Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas atau dapat mandiri.

Secara umum sasaran dari program pemberdayaan perempuan, menurut Yuningtyas Setiawati (2011), menyebutkan sasaran tersebut : (1). meningkatnya kualitas sumber daya perempuan di berbagai kegiatan sektor dan subsektor serta lembaga dan nonlembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme atau keahlian kaum perempuan ; (2). mewujudkan kepekaan, kepedulian gender dari seluruh masyarakat, peneru kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender; (3). mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya, untuk menjelaskan multi peran perempuan, disebutkan *Caroline Moser tentang Peran Rangkap Tiga Perempuan (Triple Role)* sebagai berikut : " Dalam kebanyakan rumah tangga yang berpenghasilan rendah, pekerjaan perempuan tidak hanya terdiri dari kegiatan reproduktif, tetapi juga kegiatan produktif yang sering menjadi sumber penghasilan kedua. Kerja perempuan di daerah pedesaan biasanya dalam bentuk kerja pertanian, sementara di daerah perkotaan perempuan sering bekerja dalam sektor informal yang berlokasi di dalam rumah atau di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu perempuan juga terlibat dalam pengelolaan komunitasnya yang berlangsung di daerah pemukimannya."

Menurut *Caroline Moser (1996)*, pendekatan kebijakan terhadap perempuan dalam pembangunan yang berkembang dari kepedulian terhadap persamaan, adalah pendekatan persamaan yang mengakui bahwa : " Perempuan merupakan partisipan aktif dalam pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduktifnya, memberikan kontribusi kritis, meski tidak diakui terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut mengakui dengan asumsi dasar bahwa strategi ekonomi seringkali berdampak negatif kepada perempuan, dan mengakui bahwa mereka harus " dibawa kedalam " proses pembangunan melalui akses terhadap pekerjaan dan pasar. Selanjutnya, untuk menjelaskan multi peran perempuan, disebutkan *Caroline Moser tentang Peran Rangkap Tiga Perempuan (Triple Role)* sebagai berikut : " Dalam kebanyakan rumah tangga yang berpenghasilan rendah, pekerjaan perempuan tidak hanya terdiri dari kegiatan reproduktif, tetapi juga kegiatan produktif yang sering menjadi sumber penghasilan kedua. Kerja perempuan di daerah pedesaan biasanya dalam bentuk kerja pertanian, sementara di daerah perkotaan perempuan sering bekerja dalam sektor informal yang berlokasi di dalam rumah atau di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu perempuan juga terlibat dalam pengelolaan komunitasnya yang berlangsung di daerah pemukimannya." Didukung dengan pendapat *Ekadiningyah (2002)* yang menyebutkan bahwa: "kemiskinan nelayan sebagian diantaranya dapat diatasi dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia. Kehadiran perempuan disatu sisi dapat memperluas ketersediaan bahan baku hasil laut disisi lain, perlu dipadukan agar terciptanya perluasan lapangan kerja, demi terciptanya pemerataan pendapatan dan sekaligus terciptanya hubungan antara bahan baku, proses dan marketing."

Menurut *Ekadiningyah (2005)*, tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah : (1). Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek



pembangunan seperti yang terjadi selama ini.(2).Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.(3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri dan (4).Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Dari pendapat diatas, pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir, harus menggunakan pendekatan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat, dalam pengelolaan lingkungannya. Wahyono (2010) memberikan pendapat bahwa adaptasi lingkungan diperlukan oleh masyarakat nelayan dalam rangka memberdayakan individu atau kelompoknya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap perubahan lingkungan dan sosial merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia, terutama pengetahuan lingkungan wilayah pesisir menjadi penting bagi masyarakat perempuan.

Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir.

Menurut Buckles & Rusnak dalam Wijana (2014), fungsi biofisik suatu ekosistem akan selalu menghadapi tantangan dan gangguan instabilitas, karena dalam setiap pemanfaatan sumberdaya alam akan selalu terkait dengan empat dimensi yang penting, yaitu: (1) Sumberdaya alam ditemukan dan melekat pada *bentang kawasan geografis* yang saling berhubungan satu sama lain (*interconnected space*), sehingga suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang pada satu titik akan menghasilkan dampak yang dirasakan hingga jauh di luar kawasan (*off-site*) dimana individu atau kelompok itu berada. (2) Sumberdaya alam terletak di dalam ruang *sosial-politik* dimana ditemukan kompleksitas hubungan sosial dan relasi kekuasaan yang seringkali tidak seimbang di antar pelaku socio-ekonomi yang berinteraksi dan menjalankan pengaruhnya. Dalam kesatuan ruang geografis sumberdaya alam, keputusan-keputusan socio-politik yang dibuat suatu pihak akan mempengaruhi posisi pihak lain pada kawasan yang sama, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini terjadi karena mereka menyandarkan diri pada basis kepemilikan (sumberdaya alam) yang sama.(3) Sumberdaya alam adalah material bernilai *ekonomi* yang selalu menghadapi *persoalan kelangkaan* akibat perubahan lingkungan, peningkatan permintaan dan ketimpangan distribusi. Perubahan lingkungan bisa terjadi akibat eksploitasi lahan yang berlebihan (*over-exploitation*), degradasi fungsi lahan dan pembukaan lahan yang dilakukan secara ekstensif dan perubahan pada teknologi dan manajemen lahan. (4) Sumberdaya alam tidak hanya dimaknai sebagai sumberdaya material dimana setiap individu dan kelompok berkompetisi untuk mendapatkannya. Namun lebih dari itu, sumberdaya alam juga berdimensi kultural dan bermakna sebagai identitas etnisitas, dan memiliki dimensi simbolik bagi komunitas tertentu. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya pesisir harus dikaji melalui tiga aspek, yakni ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN.

Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasir limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sebagai alasan bahwa di Kecamatan ini memiliki pendapatan yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya pesisir khususnya sumberdaya perikanan laut. Waktu Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, yakni bulan Februari sampai Juni 2017. Tahapan Persiapan



Jumlah Tanggungan : Jumlah tanggungan keluarga tidaklah terlalu besar. Hanya 2,02% responden yang menanggung jumlah keluarga antara 7-9 orang. Sebesar 87,88% menanggung 0-3 orang. Sebesar 10,10% menanggung antara 4-6 orang.

Agama : Responden sebesar 69,70% beragama Islam, Responden sebesar 11,11% beragama Kristen dan Responden sebesar 19,19% beragama Budha/Konghucu. Hasil wawancara dengan mereka, diperoleh informasi bahwa kehidupan beragama di lokasi mereka tinggal cukup harmonis.

Pendidikan Terakhir : Sebesar 39,39% responden berpendidikan tamat SMA dan sederajat, sementara hanya 4,04% yang sudah Sarjana (S1), sebesar 37,37% berpendidikan SMP dan 19,20% tamat SD. Pendidikan responden bervariasi, namun tidak menghalangi mereka melaksanakan berbagai aktivitas di wilayahnya.

Pekerjaan Responden : Diperoleh gambaran responden perempuan tersebar dalam berbagai jenis pekerjaan. Jumlah terbanyak adalah perempuan yang bekerja sebagai pedagang/wiraswasta sebesar 31,31%, perempuan yang bekerja di warung makan/minuman/restoran sebesar 17,17% baik sebagai pengelola/pemilik dan sebagai pekerja. Hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi terdapat pengelola warung makan yang sudah mengelola sekitar 25 tahun. Responden yang bekerja sebagai PNS/Guru sebesar 17,18%, dan terdapat perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh pemanen kerang sebesar 7,07%. Namun terdapat responden sebagai Ibu Rumah Tangga artinya tidak bekerja sebesar 16,16%.

Pekerjaan Suami : Suami para responden yang terbanyak adalah yang bekerja di sektor swasta / wiraswasta sebesar 35,35% , responden dengan suami sebagai nelayan sebesar 23,23%, Sementara 18,19% suami responden adalah PNS dan Guru. Namun 23,23 % suaminya bekerja sebagai buruh dan serabutan bahkan ada yang tidak bekerja.

asal Daerah : Sebesar 41,41% responden berasal dari Provinsi Riau, artinya asli orang Melayu, sebesar 19,19% masyarakat Tionghoa, sebesar 17,17% dari Sumatra Barat, sebesar 13,13% dari Sumatra Utara/Nias dan 9,10% berasal dari Jawa. Masyarakatnya cukup harmonis, walaupun terdiri dari beberapa suku tersebut.

Analisis Pemberdayaan Perempuan dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat di Kecamatan Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

Keempat indikator yakni akses, partisipasi, kontrol dan manfaat merupakan prasyarat untuk menjawab pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir. Rekapitulasi penelitian dari keempat indikator terlihat dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pemberdayaan Perempuan berdasarkan indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat.

| Indikator | Tanggapan Responden | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|----|------|----|------|----|-------|----|---------|---|
| | SS/SB | | S/B | | N/CB | | TS/TB | | STS/STB | |
| | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % |
| Akses | 238 | 40 | 215 | 36 | 83 | 14 | 58 | 10 | 0 | 0 |
| Partisipasi | 241 | 81 | 33 | 11 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kontrol | 49 | 16 | 91 | 31 | 104 | 35 | 53 | 18 | 0 | 0 |
| Manfaat | 429 | 72 | 88 | 15 | 65 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 957 | 54 | 427 | 24 | 269 | 15 | 128 | 7 | 0 | 0 |
| Jumlah Skor | 4785 | | 1708 | | 807 | | 256 | | 0 | |
| Interval Skor | 7556 | | | | | | | | | |
| Penilaian | 7484 - 8910 | | | | | | | | | |
| | Sangat Setuju = Sangat Baik | | | | | | | | | |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Ar-Raniry.

2. Dilarang menyebarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini kepada pihak lain.



Dari Tabel 1 diatas, diperoleh hasil penilaian bahwa pemberdayaan perempuan berada pada penilaian “ sangat setuju “, artinya bahwa pemberdayaan perempuan sangat baik. Berdasarkan empat indikator diatas, menunjukkan bahwa akses, partisipasi dan mafaat sangat baik, hanya kontrol yang terendah, 53% jawabannya berada pada posisi “ Tidak setuju “ artinya tidak baik. Berdasarkan informasi dari para responden, kaum perempuan tidak dilibatkan atau sebagian tidak ikut dalam mengawasi keseluruhan kegiatan di sekitarnya, dengan alasan sibuk dengan rumah tangga masing-masing. Sebagian besar perempuan di wilayah ini sudah menikmati hasil atau pemanfaatan sumber daya, karena daerahnya ramai, terbuka bagi siapa saja terutama untuk berusaha, sehingga mereka sudah cukup senang tinggal di wilayah ini.

Berdasarkan temuan penelitian, dari keempat indikator pemberdayaan perempuan, berada pada kategori sangat baik, yakni dari akses, partisipasi dan manfaat yang menunjukkan hasilnya sangat baik, hanya pada indikator kontrol yang menunjukkan hasilnya baik. Perempuan ini senada dengan pendapat Novian (2010) bahwa pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Dikatakan sebagai proses karena akses dan partisipasi para responden sudah terbuka, sementara dari tujuan memanfaatkan sumberdayapun sudah sangat baik sehingga perempuan sudah berdaya. Namun disatu sisi perempuan masih belum memberdayakan dirinya dalam hal ikut memecahkan permasalahan di lingkungannya. Mengacu kepada konsep pemberdayaan, maka dalam membahas pemberdayaan perempuan dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan diri sendiri (*self empowerment*), pemberdayaan dari pemerintah (*government empowerment*) dan non pemerintah (*community empowerment*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan lebih besar menunjukkan pemberdayaan dirinya sendiri, karena terlihat bahwa perempuan dapat melakukan berbagai aktivitasnya, walaupun dorongan rendah dari pemerintah atau dari non pemerintah. Figur pimpinan yang tetap mendominasi aktivitas perempuan didaerah ini, yakni figur Ibu Camat dan Pak Camat serta Kepala Desa beserta Ibu Kepala Desa. Begitu digerakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan / Ibu Camat, maka semua perempuan bergerak untuk melakukan berbagai aktivitasnya.

Memberdayakan perempuan adalah sebuah proses yang meliputi baik penciptaan lingkungan yang kondusif bagi perempuan yang bebas dari diskriminasi, dan memperkuat kemampuan perempuan untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri dan sepenuhnya berkontribusi untuk membawa perubahan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di wilayah ini dapat menunjukkan kemampuannya, dengan segala keterbatasannya, dengan menerima apa adanya. Tuntutan perempuan tidaklah terlalu tinggi, mereka hanya menginginkan dapat berkontribusi dalam ekonomi. Hal ini dapat diperkuat dari hasil wawancara dengan para responden, yakni tokoh masyarakat laki-laki dan tokoh adat perempuan, bahwa perempuan di wilayah ini tidak menginginkan macem-macam, mereka pasrah dengan keadaan yang ada. Maka mereka mau bekerja apa saja, yang penting mendapatkan tambahan penghasilan yang halal walaupun dukungan pemerintah sangat kurang.

Peran perempuan dalam segala bentuk aktivitas sangatlah penting. Melihat peranan perempuan dalam bidang ekologi, ekonomi dan sosial budaya, sebagai penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, merupakan partisipan aktif dalam pembangunan, melalui peran produktif dan reproduktifnya memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan pembangunan di wilayahnya. Seperti yang disampaikan Ekadiningyah bahwa tujuan program pemberdayaan perempuan antara lain meningkatkan kemampuan perempuan untuk melibatkan diri dalam pembangunan sebagai partisipasi aktif (subjek) dan tidak sekedar menjadi obyek dalam pembangunan. Demikian juga halnya untuk wilayah pesisir, potensi yang besar tersebut harus dapat diakses, harus terlibat, dapat mengawasi dan memperoleh manfaat bagi kesejahteraan keluarganya.



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan

Gambaran perempuan di wilayah pesisir Kecamatan Pasir Limau Kapas, menunjukkan bahwa dengan umur yang produktif mereka dapat beraktivitas dalam berbagai pekerjaan. Pendidikan yang rendah tidak menjadi kendala dalam memperoleh pekerjaan dengan syarat mau bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan. Masyarakat dengan keragaman agama, dan budaya yang berasal dari berbagai daerah, tidak menjadi kendala dalam menjalin kebersamaan dalam masyarakatnya. Dengan dukungan yang minim dari pemerintah daerah, kaum perempuan tetap beraktivitas dalam berbagai aspek kehidupannya.

Pemberdayaan Perempuan dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial budaya berdasarkan indikator akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sudah berjalan sangat baik. Namun dari ketiga perspektif tersebut berdasarkan keempat indikator, hanya perspektif ekologi yang memperoleh hasil cukup baik, artinya pemberdayaan perempuan dari aspek ekologi belum maksimal. Hasil temuan berdasarkan indikator kontrol, di peroleh hasil cukup baik, artinya kontrol terhadap ekologi, ekonomi dan sosial budaya belum maksimal.

Saran

Perlu peningkatan program pemberdayaan perempuan yang berkaitan langsung dengan lingkungan wilayah ini. Sehingga perempuan turut serta dalam menjaga dan melestarikan wilayah pesisir, serta dapat lebih meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir.

Tidak peningkatan kontrol dari kaum perempuan, perlu adanya program peningkatan kapasitas perempuan, agar terbiasa dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbainah, 2009. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Pemanfaatan Masyarakt Pesisir Pantai (Studi pada Desa Kuala Lama Kec.Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai.)* Universitas Sumatra Utara.
- YP, Hartati S, Widiati NI, 2008. Peran dan Potensi Wanita Pesisir dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga <http://www.isjd.pdii.lipi.go.id>. 11 Desember 2016, jam 04.00.
- Wahyuningsih, 2004. *Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Makalah, Direktur Kelautan dan Perikanan Bapenas.
- Irwan, Zoer'aini, 2012. *Prinsip-Prinsip Ekologi, Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Bumi Aksara, Jakarta
- DR.Mansour, 2006, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Andoko, Waluyo, Sofa Marwah, Riris Ardhanariswari, 2007. *Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Daerah Tertinggal*. FISIP UNSOED Purwokerto.
- Hamdani, R.Hamdani, 2015. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*. Makalah pada Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Bidang Ekologi Manusia, FISIP USU Medan.
- Hamawati, 2014. Optimalisasi Peran dan Program Pemberdayaan Wanita dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Keluarga Pesisir. *Jurnal Ilmiah Pangea, Edisi Pertama Vol.1 No.1, Mei 2014, Ternate, Provinsi Maluku Utara*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, atau keperluan lainnya.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Meriyanto, Meyzi, Lena Farida, Frini Karina, 2017. *Analisis Perempuan Bekerja dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Wilayah Pesisir Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir*, Hasil Penelitian, FISIP Universitas Riau.
- Promi, T.O, 1995, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rawan,Zoer'aini Djamal, 2012. *Prinsip-prinsip Ekologi. Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusnadi, 2004. *Polemik Kemiskinan Nelayan*, Pondok Edukasi-Pokja Pembaruan, Bantul.
- Mosses, Julia Cleves, 1996, *Gender dan Pembangunan*, Rifka Annisa, Woman Crisis Centre.
- Mosses, Caroline,O.N, 1992, *Gender Planing in The Third World: Meeting Practical and Strategic Gender Need*, Publishing Company.
- Mugroho, Riant, 2008. *Gender dan Startegi Pengarus Utamaannya di Indonesia*, Pustaka, Yogyakarta.
- Purnamasari, Lukita, 2009. *Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat*. Jurnal Lingkungan Hidup, November 2009.
- Puspitawati, Herien,2013. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia,IPB.
- Rutawan,I Made, 2014. *Konsep-konsep Dasar Ekologi, dalam berbagai aktivitas lingkungan*, Alfabeta, Bandung.
- Rusli,Zaili, 2014. *Pemeriksaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setyawati, E.Yuningtyas, 2011. *Pemberdayaan Perempuan Pesisir melalui pengembangan komoditas perekonomian berbasis potensi lokal (Studi pemberdayaan ekonomi Perempuan di Kawasan Pantai Kuwaru, Kec.Srandakan, Kab.Bantul, DIY*. FISIPOL Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sujianto, 2010. *Kemiskinan dan Pemberdayaan, Studi Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Pelalawan*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Efrizal, 2010. *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pembangunan Masyarakat Pesisir*.
- Priono, Rachmat.2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur.
- Sunyanto, 2003, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, *Perlindungan Lingkungan Hidup*.
- Wahyuno, Ary,2010. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Media Pressindo, Yogyakarta.

